

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah global yang dihadapi dan menjadi perhatian orang di dunia. Berdasarkan data Worldometer, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu sekitar 276,534,274 dan masih diliputi dengan masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan selalu memperoleh perhatian utama bagi setiap negara khususnya negara berkembang, termasuk Indonesia. Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang di hadapkan pada masalah kemiskinan yang tidak bisa diabaikan. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran pemerintah bahwa kegagalan mengatasi persoalan kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat.

Menurut Brendley (dalam Alifiulahtin, 2020:1) menjelaskan bahwa kemiskinan memiliki definisi ketidakmampuan yang dialami oleh seseorang untuk mendapatkan suatu barang atau pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. sehingga secara umum masyarakat miskin adalah suatu kondisi masyarakat yang berada dalam situasi termarjinalkan karena terjadi kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian dan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Menurut Parsudi (1995:11) kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yakni adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau

segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum yang berlaku di masyarakat.

Di Indonesia ataupun di banyak negara berkembang di dunia, upaya penanggulangan kemiskinan memang menjadi sebuah cita-cita bagi setiap pemimpin dan rezim yang memimpin sebuah negara, termasuk Indonesia. Masalah kemiskinan memang menjadi faktor yang amat penting untuk kemudian menjadikan negara tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dengan tujuan akhirnya adalah bagaimana kemudian angka kemiskinan tersebut bisa ditekan dan terus di kurangi.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu diantara program-program penanggulangan kemiskinan tahun 2007 yang direncanakan pemerintah. Dalam usaha penanggulangan kemiskinan, pemerintah menggulirkan kebijakan PKH melalui UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial yang ditindaklanjuti dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Tidak semua Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) bisa menjadi peserta PKH. Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia 0-6 tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria

anak SD/MI atau sederajat, anak SMP/MTS atau sederajat, anak SMA/MA atau sederajat, dan anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016 terjadi penambahan komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan dari umur 60 tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Pemerintah Indonesia selama ini telah banyak memiliki program-program untuk pengentasan kemiskinan yang ada. Dalam penelitiannya Farezagia (2018) menyatakan bahwa upaya pengentasan terdapat dua strategi yang harus di tempuh. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan mereka dari berbagai bidang. Kedua, melakukan pelatihan kepada mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha pencegahan terjadinya kemiskinan baru. Menurut Ginanjar, dkk (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan haruslah memiliki perencanaan, penetapan kebijakan, dan strategi serta arah yang jelas dalam penanganannya dan didukung dengan program dan kegiatan yang tepat sasaran yaitu keluarga miskin. Upaya-upaya yang secara konteks kemudian diajukan untuk mengurangi kemiskinan juga terus diluncurkan oleh pemerintah dengan model-model bantuan ataupun program-program penanggulangan kemiskinan yang secara entitas langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Kota Gorontalo merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang tidak luput dari masalah kemiskinan. Berikut tabel kemiskinan wilayah Kota Gorontalo yang didapatkan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.

Berikut data jumlah penduduk miskin yang didapatkan peneliti pada bagian divisi Bantuan Sosial khususnya di Kecamatan Kota Timur.

Tabel 1.1 Tabel Kemiskinan Wilayah Kota Gorontalo Kecamatan Kota Timur Tahun 2020

Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk Miskin
Heledulaa Selatan	1.079
Heledulaa Utara	1.543
Ipilo	2.147
Moodu	1.978
Padebuolo	1.729
Tamalate	1.834
Total	10.310

Sumber : *Sub Bagian Bansos Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo, 2020.*

Program perlindungan sosial ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu yang telah ditetapkan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Dengan pemberian akses ini, diharapkan terjadi perubahan perilaku yang mendukung tercapainya kesejahteraan sosial. Dalam jangka pendek dana bantuan PKH bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung), dalam jangka panjang merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan modal manusia).

Sejak dikeluarkannya program ini pada tahun 2007 hingga saat ini, banyak masyarakat miskin yang kemudian menjadi penerima manfaat ini. Karena dalam konteks ini yang menjadi objek penelitian ataupun sampel penelitian adalah masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. Maka sebagaimana data yang di himpun dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo, diperoleh data bahwa jumlah keseluruhan masyarakat yang masuk kategori miskin di Kota Gorontalo berjumlah 81.782 Rumah Tangga Sasaran Miskin (RTSM).

Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan/komponen yang telah ditetapkan, persyaratan atau komponen tersebut sebagai berikut:

1. Kriteria komponen kesehatan meliputi:
 - a) Ibu hamil/menyusui; dan
 - b) Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Kriteria komponen pendidikan meliputi:
 - a) Anak SD/MI atau sederajat;
 - b) Anak SMP/MTs atau sederajat;
 - c) Anak SMA/MA atau sederajat; dan
 - d) Anak usia enam sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:
 - a) Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh tahun); dan
 - b) Penyandang disabilitas berat.

Realitanya penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah ternyata belum dapat mencapai hasil yang optimal. Jumlah penduduk miskin memang telah dapat dikurangi secara berarti akan tetapi dari jumlahnya masih cukup besar tidak semua masyarakat miskin di Kota Gorontalo menerima bantuan Program Keluarga Harapan, hal ini dikarenakan pemerintah memiliki indikator dalam menentukan keluarga mana yang kemudian berhak menerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) seperti dilihat dari tinggi dan rendahnya pendapatan masyarakat serta tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Pendapatan sangat menentukan tingkat kehidupan dalam keluarga, terutama pada pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Di kelurahan ipilo ini tingkat pendapatan bervariasi ada yang sumber pendapatan tinggi dan juga sumber pendapatannya rendah atau minim, untuk memenuhi kebutuhan keseharian. Di kelurahan Ipilo Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berjumlah 2.147 dengan penerima hak Program Keluarga Harapan (PKH) berjumlah 118 rumah tangga.

Namun demikian, dalam prakteknya, khususnya di kelurahan Ipilo, Program Keluarga Harapan masih memiliki kendala dalam pelaksanaannya. Beberapa diantaranya mengenai dana Program Keluarga Harapan yang sesekali masih tidak lancar dan ada diantara penerima dana Program Keluarga Harapan yang sudah dikategorikan mampu tetapi masih terdaftar dalam penerima bantuan dana Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki kriteria kemiskinan yang telah ditentukan oleh Badan Pusat Statistika dan Dinas Sosial tetapi masih ada penerima PKH yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima PKH.
2. Proses penyaluran penggunaan dana bantuannya oleh peserta PKH masih banyak mengalami kendala dan kesalahan.
3. PKH dipusatkan pemerintah untuk membantu RTSM dalam memenuhi kebutuhan primer dan dasar serta dapat memutus mata rantai kemiskinan.

1.3 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: apakah terdapat pengaruh implementasi program keluarga harapan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh implementasi program keluarga harapan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini terdiri dari:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan untuk penyumbang konsep atau teori tentang: 1) Implementasi program dan 2) Kesejahteraan masyarakat

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, bagi pemerintah setempat, dapat memberikan masukan positif bagi pemerintah Kota Gorontalo dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan Program Keluarga Harapan, dapat pula dijadikan sebagai masukan bagi pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo untuk meningkatkan peran serta kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan.